



Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia

Impact of the increase in fuel oil (BBM) on inflation and its implications for macroeconomics in Indonesia

Widia Wardani^{1*}, Suriana², Siti Ummi Arfah³, Zulaili⁴, Porkas Sojuangon Lubis⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Alwashliyah Medan

Corresponding Author*: wardaniwidia48@gmail.com

Abstrak.

Terjadinya lonjakan harga minyak dunia disebabkan oleh imbas dari peperangan yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kegoncangan ekonomi secara signifikan terhadap perekonomian dunia. Akibat perang ini berimbas pada kenaikan harga minyak bumi hampir di seluruh dunia. Adanya lonjakan minyak dunia dinilai berpengaruh nyata terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Harga minyak yang tinggi ternyata tidak menguntungkan negara manapun termasuk dibelahan bumi manapun juga di Asia khususnya di negara kita. Kenaikan harga BBM disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia juga dikarenakan adanya *under supply* dalam negeri dibandingkan dengan *demandnya*. Besarnya subsidi BBM senilai hampir 520 Trilyun sangat membebani dan menguras APBN sehingga dengan hal ini Pemerintah menilai sangat *urgent* untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi. melakukan perhitungan yang sangat hati-hati dan akurat dalam menghitung besaran kenaikan BBM di dalam negeri. Dengan kenaikan imbas kenaikan BBM akan berimplikasi terhadap inflasi harga secara simultan dan secara eksponensial akan berpengaruh terhadap fundamental makro ekonomi Indonesia.

Kata Kunci : Kenaikan BBM, Inflasi, Perekonomian Indonesia

Abstract

The surge in world oil prices caused by the impact of the war that took place in Europe between Russia and Ukraine caused a significant economic shock to the world economy. As a result of this war impact on the increase in oil prices almost all over the world. The existence of a surge in world oil is considered to have a significant impact on economic conditions in Indonesia. High oil prices do not benefit any country, including any part of the world in Asia, especially our country. The increase in fuel prices was due to the high world oil price as well as the domestic under-supply compared to the demand. The amount of fuel subsidies worth almost 520 trillion is very burdensome and drains the state budget, so the government considers it very urgent to raise subsidized and non-subsidized fuel prices. carry out very careful and accurate calculations in calculating the amount of fuel price increases in the country. With the increase in the impact of the fuel price hike, it will have implications for price inflation simultaneously and will have an exponential effect on Indonesia's macroeconomic fundamentals.

Keywords: Fuel Increase, Inflation, Indonesian Economy.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak dan gas alam Indonesia patut bersyukur kepada Tuhan YME karena dikaruniai oleh kekayaan alam yang berlimpah baik minyak bumi, gas, Nikel, batubara, dan lain-lain. Serta aneka ragam hayati yang sudah sangat terkenal di belahan bumi mancanegara. Tetapi sangat disayangkan hasil bumi yang berlimpah ruah tersebut sejauh ini belum dapat memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia yang masih berada dalam jaring kemiskinan. Diperkirakan ada sekitar 26,16 juta (maret 2022) masyarakat miskin yang tersebar di kota dan pedesaan. Sebagian pengamat ekonomi Indonesia menyatakan tidak kunjung membaiknya kondisi ekonomi secara umum di negara ini akibat kesalahan tata kelola atau *miss* manajemen kebijakan Pemerintah, akibat korupsi serta kepentingan politik yang kurang berpihak pada rakyat yang telah terjadi hampir 77 tahun Indonesia merdeka namun bisa kita saksikan masih banyak kondisi rakyat Indonesia sebagian masih sangat memprihatinkan.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN maka Indonesia masih kalah dalam kesetaraan dan kesejahteraan ekonominya. Jurang antara kaya dan miskin sangat riskan. Tidak jarang hal ini menimbulkan dampak dan serta berimplikasi terhadap tingkat pengaguran serta kriminalitas yang terjadi di mana-mana. Pemerintah menyadari betul tidaklah mudah dalam tatakelola para aparatur negara yang telah cukup dibekali dalam ilmu dan dibarengi beragam peraturan pemerintah yang tekadang saling tumpang tindih sehingga banyak distribusi bantuan Pemerintahan tidak tepat sasaran. Belum lagi banyak pejabat kita yang belum memiliki integritas dalam bertugas dengan cara pungli dan korupsi serta berkolusi sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi keterpurukan di berbagai lini kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan harga BBM dan implikasinya terhadap kondisi makro ekonomi, Samuelson (2004) telah memperlihatkan gambaran umum yang terjadi pada negara-negara di dunia, bahwa adanya kenaikan harga BBM, dalam hal ini berupa goncangan harga minyak dunia berpengaruh nyata terhadap kondisi makro ekonomi, diantaranya dicerminkan adanya gross domestic product (GDP) riil yang menurun, tingkat pengangguran (unemployment) yang meningkat, dan tingkat inflasi yang menunjukkan kenaikan. Secara umum masih banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran nominalis, dimana menghitung daya beli berdasarkan pada pendapatan yang mereka terima. Sebagai contoh jika pendapatan mereka meningkat, maka beranggapan bahwa daya beli mereka meningkat tanpa memperhatikan nilai pendapatan tsb.

Kondisi ini disebut sebagai golongan masyarakat nominalis. Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan seperti yang dialami di negara Indonesia ini, kelompok masyarakat nominalis tersebut tentunya akan mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya yang dituntut dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, termasuk dalam kondisi normal sekalipun adalah masyarakat yang berpola pikir substansialis. Masyarakat substansialis adalah masyarakat yang melihat dari sisi nilai pendapatan atau daya beli, jadi sangat mungkin terjadi walaupun pendapatan masyarakat meningkat tetapi dengan adanya kenaikan harga-harga yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, maka justru masyarakat tersebut mengalami penurunan nilai daya beli. Masyarakat substansialis akan mampu dalam mengantisipasi dan menyikapi krisis ekonomi yang terjadi.

Krisis ekonomi di Indonesia khususnya, dan umumnya krisis ekonomi dunia yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari sisi kekuatan politik dan ekonomi di beberapa negara-negara di dunia. Berbagai negara-negara tersebut cenderung mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas (free-market economy) yang menjunjung tinggi persaingan (competition) sebagai resep keberhasilan ekonomi, bukan cooperation. Kekuatan politik mengarah pada sistem demokrasi (democratic) gaya barat, yakni kebebasan untuk melakukan apa saja selama menguntungkan negara-negara tersebut.

Seperti yang terjadi saat ini adanya kenaikan harga BBM di Indonesia tentunya akan berdampak kenaikan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang semakin menurun, dampaknya terutama yang dirasakan oleh masyarakat berdaya beli rendah dan miskin, termasuk bagi mereka yang berada di perkotaan, dan juga bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan. Secara umum dapat dipahami pula, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM akan berimplikasi secara eksponensial terhadap perekonomian Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada ilustrasi rilis Pertamina pada tanggal 3 september 2022 sebagai berikut.

ISI GAMBAR ATAU TABEL

HARGA BBM 01 September 2022		
Harga Lama		Harga Baru
Rp. 7.650 / liter	PERTALITE	Rp. 10.000 / liter
Rp. 12.500 / liter	PERTAMAX	Rp. 16.000 / liter
Rp. 5.150 / liter	SOLAR	Rp. 7.200 / liter

Produk BBM yang disediakan SPBU Pertamina mengalami kenaikan, terutama untuk BBM subsidi. Sedangkan untuk BBM jenis lainnya dibanderol dengan rincian yakni Dexlite CN 51 17.100/Liter, Pertamina Dex CN 53 17.400/Liter dan untuk Pertamina Turbo RON 98 16.250/Liter.



Dari grafik di atas menunjukkan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Sehingga dapat berimplikasi terhadap merambatnya kenaikan beragam komoditas barang-barang lainnya. Akhirnya daya beli masyarakat akan menurun pertumbuhan ekonomi juga menurun

Adapun di samping itu terdapat Pertumbuhan Eksponensial cukup umum ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

Pertumbuhan eksponensial dapat menyebabkan hasil yang mengejutkan masyarakat awam, karena kecepatan perubahannya meningkat drastis seiring berjalannya waktu. Kuantitas yang awalnya meningkat dengan pelan lama kelamaan menjadi meningkat dengan jauh lebih tajam. Selain itu, beberapa kuantitas yang menunjukkan pertumbuhan eksponensial sering dinyatakan dengan angka persen saja tanpa label eksponensial, seperti angka-angka inflasi atau suku bunga pinjaman

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi RI minus 2,07 persen. Realisasi produk Produk Domestik Bruto ini anjlok dibanding 2019 yang tumbuh dikisaran 5,02 persen sekaligus yang terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh minus 13,16 persen akibat pandemi Covid yang memang hampir melanda seluruh dunia yang menyebabkan stagnasi yang cukup fantastis hampir di semua lini kehidupan manusia yang tengah mewabah dipenghujung akhir tahun 2019 akibat virus yang awalnya berasal dari China hingga menyebar keseluruh dunia sehingga aktifitas seluruh wilayah antar negara nyaris terlockdown. Selama hampir 2 tahun aktifitas terbatas akibat virus tersebut sampai akhirnya para ilmuwan melakukan banyak eksperimen sampai ditemukannya vaksin yang dapat mengatasi penyebaran virus yang telah menyebabkan jutaan umat manusia meninggal hampir di seluruh penjuru dunia.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kontraksi ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mitra dagang yang juga tercatat minus pada kuartal IV 2020. Rinciannya, Amerika Serikat (AS) minus 2,5 persen, Singapura minus 3,8 persen, Korea Selatan minus 1,4 persen, Hong Kong minus 3 persen, dan Uni Eropa minus 4,8 persen. Suhariyanto menjelaskan, dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mencatatkan minus sepanjang 2020. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66 persen terhadap PDB berkontraksi hingga 2,63 persen. Kemudian konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) berkontraksi 4,29 persen, investasi berkontraksi 4,95 persen, ekspor berkontraksi 7,7 persen, dan impor berkontraksi 14,71 persen. "Seluruh komponen tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah," kata Suhariyanto.

Adapun secara historis, seperti pada 2014 contohnya, saat harga BBM jenis Premium yang saat itu paling banyak dikonsumsi, dinaikkan pada bulan November hingga 30%. Inflasi kemudian melesat hingga 8,36% (yoy). Hal yang sama juga terjadi setahun sebelumnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Juni 2013 yang memicu kenaikan inflasi hingga 8,38% (yoy).

"Kedua dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal, per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi.

Selanjutnya dari sisi lapangan usaha, 10 dari 17 sektor ekonomi menyumbang kontribusi negatif. Paling parah ialah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 15,04 persen. Diikuti, sektor akomodasi dan makan yang mencapai minus 10,22 persen pada 2020. Padahal, pada 2019 lalu, sektor ini masih tumbuh 5,79 persen. "Akomodasi dan makan minum turun karena tingkat penghunian kamar hotel minus 39,75 persen, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara minus 75,03 persen, dan tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama pandemi covid-19," tutur Suhariyanto. Setelahnya, ada industri pengolahan yang tercatat minus 2,93 persen, perdagangan minus 3,72 persen, konstruksi minus 3,26 persen, pertambangan dan penggalan minus 1,95 persen. Lalu, sektor jasa lainnya minus 4,1 persen, jasa perusahaan minus 5,44 persen, serta pengadaan listrik dan gas minus 2,34 persen. "Hanya ada tujuh sektor yang masih tumbuh positif," imbuh Suhariyanto. Beberapa sektor yang positif tersebut, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 1,75 persen, jasa keuangan dan asuransi naik 3,25 persen, informasi dan komunikasi naik 10,58 persen, termasuk jasa pendidikan naik 2,63 persen. Kemudian, sektor real estate naik 2,32 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial naik 11,6 persen, serta pengadaan air naik 4,94 persen. "Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial naik tinggi 11,6 persen karena pencairan pembayaran insentif covid-19 untuk tenaga kesehatan, peningkatan pendapatan rumah sakit untuk pelayanan covid-19," jelas Suhariyanto.

Dari sisi kontribusinya, ia menambahkan sektor transportasi dan pergudangan menjadi sumber kontraksi ekonomi terdalam, yakni minus 0,64 persen. Sedangkan sumber kontraksi lainnya berasal dari industri pengolahan sebesar minus 0,61 persen, perdagangan minus 0,49 persen, dan konstruksi minus 0,33 persen.

Suku bunga

Suku bunga pinjaman biasanya memiliki sifat bunga berbunga (*compound interest*), sehingga total beban utang juga merupakan pertumbuhan eksponensial. Misalnya, dalam pinjaman sebesar 1 juta dengan bunga 1,2% yang dikenakan per bulan, setelah bulan pertama utang menjadi 1,012 juta, dan bunga berikutnya dihitung berdasarkan 1,012 juta (bukan 1 juta), dan seterusnya. Total beban setelah n bulan, tanpa adanya pembayaran atau biaya tambahan, dapat dihitung dengan rumus eksponensial. Besar utang ini akan berlipat ganda dalam waktu kurang dari 5 tahun (60 bulan), 4 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan seterusnya.

Akhir pekan ini, tepatnya hari Sabtu 3 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter. Pertamina dari Rp.12.000 menjadi 16.000 dan solar dari Rp.5.150 menjadi Rp.7.200 demikian kenaikan harga yang terjadi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian," kata Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden Jokowi dan Menteri terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan di pemberitaan Tv Pemerintah dan swasta.

Perlu diketahui konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin. Sehingga kenaikan harga Pertalite tentu akan mendorong kenaikan inflasi, yang di prediksi akan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) di awal bulan ini mengumumkan data inflasi Indonesia periode Juli 2022 yang tumbuh 0,64% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan (*year-on-year/yoy*), laju inflasi terakselerasi. Inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (*yoy*), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35% sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Dalam keranjang inflasi, bensin memiliki bobot 4% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, misalnya, harga BBM naik 10%, inflasi bisa terdorong hingga 0,4 poin persentase terhadap inflasi. Secara historis, seperti pada 2014 contohnya, saat harga BBM jenis Premium yang saat itu paling banyak dikonsumsi, dinaikkan pada bulan November hingga 30%. Inflasi kemudian melesat hingga 8,36% (*yoy*). Hal yang sama juga terjadi setahun sebelumnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Juni 2013 yang memicu kenaikan inflasi hingga 8,38% (*yoy*).

Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya gambaran riil kondisi di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan telaah lebih lanjut, yakni sejauhmana implikasi dari adanya kenaikan harga BBM tersebut terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini, yakni berupa data sekunder (*secondary data*), dan diperoleh melalui berbagai referensi yang relevan (*relevant reference*) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat. 2. Tinjauan Pustaka Berbagai pakar ekonomi telah banyak membahas tentang hubungan antara harga (*price*) dan permintaan (*demand*), termasuk implikasi harga terhadap makro ekonomi (Samuelson, 2004). Harga merupakan salah satu faktor dominan bagi masyarakat negara berkembang dan miskin dalam mempengaruhi permintaan mereka terhadap produk atau komoditi tertentu. Secara sederhana keterkaitan harga (*P*) dan permintaan (*Qd*) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$Q_d = f(P)$ Harga merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor-faktor lainnya yang akan mempengaruhi permintaan. Sisi lain menyatakan bahwa permintaan akan terjadi apabila ada kebutuhan dan daya beli. Ini artinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, termasuk kebutuhan akan bahan bakar minyak bagi kebanyakan masyarakat merupakan kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi, karena berkenaan dengan berbagai pemenuhan akan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal implikasi harga terhadap makro ekonomi, bagi masyarakat di berbagai negara-negara berkembang menjadi sesuatu yang berarti atau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesi (Muhardi). Berkenaan dengan harga BBM dan implikasinya terhadap kondisi makro ekonomi, Samuelson (2004) telah memperlihatkan gambaran umum yang terjadi pada negara-negera di dunia, bahwa adanya kenaikan harga BBM, dalam hal ini berupa goncangan harga minyak dunia

berpengaruh nyata terhadap kondisi makro ekonomi, diantaranya dicerminkan adanya gross domestic product (GDP) riil yang menurun, tingkat pengangguran (unemployment) yang meningkat, dan tingkat inflasi yang menunjukkan kenaikan. Secara umum masih banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran nominalis, dimana menghitung daya beli berdasarkan pada pendapatan yang mereka terima. Sebagai contoh jika pendapatan mereka meningkat, maka beranggapan bahwa daya beli mereka meningkat tanpa memperhatikan nilai pendapatan itu sendiri. Kondisi ini disebut sebagai golongan masyarakat nominalis.

Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan seperti yang dialami di negara Indonesia ini, kelompok masyarakat nominalis tersebut tentunya akan mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya yang dituntut dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, termasuk dalam kondisi normal sekalipun adalah masyarakat yang berpola pikir substansialis. Masyarakat substansialis adalah masyarakat yang melihat dari sisi nilai pendapatan atau daya beli, jadi sangat mungkin terjadi walaupun pendapatan masyarakat meningkat tetapi dengan adanya kenaikan harga-harga yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, maka justru masyarakat tersebut mengalami penurunan nilai daya beli. Masyarakat substansialis akan lebih mampu dalam mengantisipasi dan menyikapi krisis ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi di Indonesia khususnya, dan umumnya krisis ekonomi dunia yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari sisi kekuatan politik dan ekonomi di beberapa negara-negara di dunia. Berbagai negara-negara tersebut cenderung mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas (free-market economy) yang menjunjung tinggi persaingan (competition) sebagai resep keberhasilan ekonomi, bukan cooperation. Kekuatan politik mengarah pada sistem demokrasi (democratic) gaya barat, yakni kebebasan untuk melakukan apa saja selama menguntungkan negara-negara tersebut, lihat Gambar berikut.

Sepanjang tahun 2022 dunia telah mengalami stagnasi akibat pandemi Covid yang menyebabkan lesunya perekonomian dunia. Sementara laju perekonomian dunia masih masa dalam pemulihan ada beberapa intrik politik dunia yang menyebabkan peperangan belum juga berakhir hingga saat ini. Akibat intrik politik yang terjadi di dunia barat sehingga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi serta mata rantai pasokan gas maupun minyak bumi serta bahan makanan yang mengalami kekacauan distribusi di negara-negara barat yang pada akhirnya berimbas terhadap terganggunya stabilitas perekonomian dunia. Hal ini menyebabkan Rusia sebagai negara terbesar penghasil gas dunia menghentikan pasokan.

DAFTAR PUSTAKA

- BusinessWeek. 2005. Edisi Indonesia No.16/IV/28 September. Jakarta: PT Indomedia Dinamika dan The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Ekspos. 2005. Edisi No. 04/1/September. Jakarta: PT. Eksposcitra Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 2004. Demokrasi Kita: Idealisme & Realitas serta Unsur yang Memperkuatnya. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jones, Gareth R. dan Jennifer M. George. 2003. Contemporary Management. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 2004. Macroeconomics. Dialih Bahasakan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, Anna Elly. Ilmu Ekonomi. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Swasono, Sri-Edi. 2005. Menolak Menjadi Negara Preman. Bandung: PT. 2003.
Ekspose Ekonomika: Globalisme, dan Kompetensi Sarjana Ekonomi.
Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep)-UGM.

Warta Ekonomi. 2005. Edisi No 17/XVII/22 Agustus. Jakarta: PT. Obor Sarana
Utama.

Artikel CNN Indonesia Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Minus2.07 Persen pada
2020: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206080350-532-603013/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-ri-minus207-persen-pada-2020>.